

## LAIN-LAIN –PENGELOLAAN

### PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013

2013

#### PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat di Daerah, menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga keberadaan sampah tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Bahwa pengelolaan sampah mencakup berbagai aspek yang sangat kompleks sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu, agar dapat terselenggara secara aman bagi lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi. Bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah di Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 74 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2009; Peraturan Mendagri No. 33 tahun 2010; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. HSU No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. HSU No. 8 Tahun 2013.
  - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Pengelolaan Sampah, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Maksud dan Tujuan;
    3. Ruang Lingkup;
    4. Jenis Sampah;
    5. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pemda Dalam Pengelolaan Sampah;  
Bagian Kesatu : Tugas Pemda  
Bagian Kedua : Wewenang Pemda  
Bagian Ketiga : Kewajiban Pemda
    6. Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah;  
Bagian Kesatu : Hak Masyarakat  
Bagian Kedua : Kewajiban Masyarakat  
Bagian Ketiga : Peran Serta Masyarakat
    7. Izin Pengelolaan Sampah;
    8. Pengelolaan Sampah;
    9. Pembiayaan Pengelolaan Sampah;
    10. Larangan Dalam Pengelolaan Sampah;
    11. Pengawasan Dan Pembinaan;
    12. Ketentuan Sanksi;
    13. Ketentuan Peralihan;
    14. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 17 Desember 2013.

CATATAN : -